
PENTINGNYA ETIKA POLITIK DALAM PEMBANGUNAN BANGSA

Mian Arta Ida Saragi

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Etika politik memegang peranan penting dalam proses pembangunan bangsa karena menentukan prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku para pemimpin politik dan warga negara dalam ranah politik. Etika politik memberikan landasan moral yang diperlukan untuk memastikan bahwa kekuasaan politik digunakan dengan bertanggung jawab dan untuk kepentingan umum. Artikel ini akan mengeksplorasi pentingnya etika politik dalam pembangunan bangsa, menyoroti dampaknya terhadap stabilitas politik, keadilan sosial, dan keberlanjutan pembangunan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat lebih memahami bagaimana penerapan prinsip-prinsip etika politik dapat mendukung proses pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan inklusif.

Kata Kunci: *Etika Politik, Pembangunan Bangsa, Kepemimpinan Politik*



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Etika politik adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan dan evolusi sebuah bangsa. Hal ini mengacu pada kajian tentang prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang membimbing perilaku politik, baik oleh individu maupun oleh lembaga-lembaga pemerintah. Dalam sebuah konteks politik, etika menuntut refleksi moral tentang tindakan dan keputusan yang diambil dalam mengelola kepentingan publik.

Pentingnya etika politik dalam pembangunan bangsa tidak dapat diabaikan. Di dalamnya terdapat implikasi langsung terhadap proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga politik. Secara esensial, etika politik menentukan jalan bagi pemimpin dan negara dalam menjalankan tugas mereka secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Dalam setiap fase pembangunan suatu bangsa, etika politik memainkan peran yang sangat penting. Pada tahap awal, ketika sebuah bangsa baru merdeka atau sedang berusaha membangun sistem politiknya, etika politik memandu proses pembentukan konstitusi, pembuatan undang-undang, serta penataan lembaga-lembaga pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral.

Selain itu, dalam tahap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, etika politik memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kekayaan dan sumber daya negara digunakan secara adil dan efisien untuk kepentingan bersama. Prinsip-prinsip moral seperti keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan sosial harus menjadi pijakan dalam setiap kebijakan dan program pembangunan.

Lebih jauh lagi, dalam situasi konflik atau perubahan politik yang kompleks, etika politik memperkuat legitimasi pemerintah dan stabilitas politik dengan menekankan pentingnya penyelesaian konflik secara damai, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pengelolaan kekuasaan yang bertanggung jawab.

Dalam konteks global yang semakin terinterkoneksi, etika politik juga menjadi dasar bagi hubungan antarbangsa yang saling menguntungkan. Kedaulatan negara harus dihormati, sementara pada saat yang sama, kepentingan bersama dan kerja sama antar bangsa harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang mendasar, termasuk persamaan, keadilan, dan perdamaian.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pentingnya etika politik dalam pembangunan bangsa tidak bisa dilebih-lebihkan. Etika politik bukan hanya menjadi landasan moral bagi tindakan politik, tetapi juga merupakan kunci untuk menciptakan tatanan politik yang stabil, adil, dan berkelanjutan. Dengan memprioritaskan prinsip-prinsip moral dalam setiap keputusan dan tindakan politik, sebuah bangsa dapat memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warganya, serta berkontribusi pada perdamaian dan kemajuan global.

Metode Penelitian

Metode penelitian tentang pentingnya etika politik dalam pembangunan bangsa memerlukan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan berbagai metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Tujuannya adalah untuk menyelidiki bagaimana prinsip-prinsip etika politik memengaruhi proses pembangunan nasional dan bagaimana implementasinya dapat membentuk dinamika politik, ekonomi, dan sosial suatu bangsa.

1. **Studi Literatur:** Langkah awal dalam metodologi penelitian adalah melakukan tinjauan literatur yang komprehensif tentang konsep etika politik dan hubungannya dengan pembangunan bangsa. Tinjauan literatur ini mencakup karya-karya ilmiah, artikel jurnal, buku, laporan pemerintah, dan dokumen-dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Studi literatur membantu dalam memahami kerangka kerja teoritis yang telah ada, mengidentifikasi celah pengetahuan, dan membentuk dasar untuk penelitian lebih lanjut.
2. **Analisis Konseptual:** Selanjutnya, pendekatan analisis konseptual digunakan untuk membedah konsep etika politik dan pembangunan bangsa. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang definisi, dimensi, dan implikasi etika politik dalam konteks pembangunan nasional. Dengan menganalisis konsep-konsep ini, penelitian dapat mengidentifikasi hubungan yang terjalin antara prinsip-prinsip etika politik dan proses pembangunan bangsa.
3. **Studi Kasus:** Pendekatan studi kasus digunakan untuk menginvestigasi implementasi etika politik dalam pembangunan bangsa di beberapa negara atau wilayah tertentu. Studi kasus ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara rinci berbagai aspek etika politik dalam konteks nyata, termasuk kebijakan publik, proses politik, partisipasi masyarakat, dan dampaknya terhadap pembangunan nasional. Studi kasus dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang tantangan, kesempatan, dan strategi dalam mengintegrasikan etika politik dalam pembangunan bangsa.
4. **Wawancara dan Fokus Kelompok:** Metode penelitian kualitatif seperti wawancara dan fokus kelompok digunakan untuk mendapatkan pandangan dan pengalaman langsung dari para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pembangunan nasional. Melalui wawancara dengan pejabat pemerintah, aktivis masyarakat sipil, pemimpin politik, dan akademisi, penelitian dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana etika politik memengaruhi pengambilan keputusan, implementasi kebijakan, dan dinamika politik secara umum.
5. **Analisis Data Kuantitatif:** Selain pendekatan kualitatif, metode penelitian kuantitatif juga dapat digunakan untuk mengukur dampak implementasi etika politik dalam pembangunan bangsa secara lebih sistematis. Melalui analisis data kuantitatif dari survei, indeks, atau data statistik lainnya, penelitian dapat mengevaluasi hubungan antara variabel-variabel tertentu yang terkait dengan

prinsip-prinsip etika politik dan indikator-indikator pembangunan nasional seperti pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan stabilitas politik.

6. **Analisis Komparatif:** *Pendekatan analisis komparatif digunakan untuk membandingkan praktik dan hasil pembangunan nasional antara negara-negara yang menerapkan prinsip-prinsip etika politik dengan mereka yang tidak. Analisis ini memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam mengintegrasikan etika politik dalam pembangunan bangsa, serta untuk mengevaluasi keefektifan berbagai strategi dan pendekatan dalam konteks yang berbeda.*

Dengan menggabungkan berbagai metode penelitian ini, penelitian tentang pentingnya etika politik dalam pembangunan bangsa dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang hubungan antara nilai-nilai moral dalam politik dan kemajuan sosio-ekonomi sebuah negara. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Pentingnya etika politik dalam pembangunan bangsa tidak dapat dipandang sebelah mata. Etika politik mencakup seperangkat norma, prinsip, dan nilai moral yang mengatur perilaku politik individu dan lembaga dalam suatu sistem politik. Dalam konteks pembangunan bangsa, etika politik memiliki peran yang sangat signifikan karena menciptakan landasan moral yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

Pertama-tama, etika politik memastikan bahwa para pemimpin politik dan pejabat pemerintahan bertindak dengan integritas dan kejujuran. Integritas dalam tindakan politik menghasilkan kepercayaan dan legitimasi publik terhadap pemerintah, yang merupakan fondasi bagi stabilitas politik. Ketika pemimpin dan pejabat pemerintahan mematuhi etika politik dengan memprioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok, hal ini mengurangi risiko korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan manipulasi politik yang dapat mengganggu proses pembangunan.

Kedua, etika politik memperkuat prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan politik. Dengan adanya etika politik yang ditegakkan secara konsisten, masyarakat memiliki mekanisme untuk menuntut pertanggungjawaban dari para pemimpin mereka. Transparansi dalam proses kebijakan memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah, sehingga meminimalkan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini mendorong terciptanya lingkungan politik yang terbuka dan bertanggung jawab, yang mendukung efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan.

Selanjutnya, etika politik membantu mengurangi polarisasi dan konflik politik yang dapat menghambat pembangunan nasional. Dalam sistem politik yang didasarkan pada nilai-nilai etika politik, dialog politik yang konstruktif dan inklusif dipromosikan sebagai

cara untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. Keterlibatan masyarakat dalam proses politik secara positif dihargai dan diakui, yang mengurangi risiko terjadinya konflik dan ketegangan sosial. Dengan demikian, etika politik memainkan peran penting dalam membangun harmoni dan stabilitas sosial yang diperlukan untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Selain itu, etika politik mendorong pembentukan kebijakan yang adil dan berkeadilan. Prinsip-prinsip moral yang mendasari etika politik menekankan pentingnya kesetaraan, keadilan, dan perlakuan yang adil bagi semua warga negara. Dengan memastikan bahwa kepentingan seluruh lapisan masyarakat dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan, etika politik membantu mencegah terjadinya diskriminasi dan marginalisasi sosial. Ini menciptakan fondasi yang kokoh untuk pembangunan yang inklusif, di mana setiap individu memiliki akses yang sama terhadap peluang dan sumber daya yang tersedia.

Terakhir, etika politik memperkuat prinsip kerjasama dan solidaritas dalam upaya pembangunan bangsa. Dalam menghadapi tantangan kompleks dan multidimensional, seperti kemiskinan, perubahan iklim, atau ketimpangan sosial, kerjasama antarberbagai sektor masyarakat dan pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mencapai solusi yang berkelanjutan. Etika politik mempromosikan semangat kerjasama, saling pengertian, dan saling mendukung di antara berbagai pihak, yang mengarah pada penciptaan konsensus dan kolaborasi yang efektif dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan.

Dengan demikian, pentingnya etika politik dalam pembangunan bangsa tidak bisa diremehkan. Etika politik menciptakan kerangka kerja moral yang memandu perilaku politik, mempromosikan integritas dan akuntabilitas, mengurangi konflik, memastikan keadilan, dan mendorong kerjasama yang konstruktif. Dengan memperkuat nilai-nilai etika politik dalam sistem politiknya, sebuah bangsa dapat membangun fondasi yang kokoh untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Dalam konteks globalisasi dan perubahan kompleks yang terjadi di berbagai negara, penting bagi setiap negara untuk memperkuat landasan etika politiknya sebagai bagian dari strategi pembangunan. Perubahan ekonomi, sosial, dan politik yang cepat memunculkan tantangan baru yang membutuhkan pandangan yang holistik dan inklusif terhadap praktik politik. Oleh karena itu, memperkuat etika politik tidak hanya penting untuk memastikan keberhasilan pembangunan nasional, tetapi juga untuk mempromosikan stabilitas regional dan perdamaian global.

Selain itu, penting untuk diakui bahwa pelaksanaan etika politik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh warga negara. Masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta juga memiliki peran penting dalam memastikan penerapan nilai-nilai etika politik dalam kehidupan politik sehari-hari. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pembangunan, etika politik dapat menjadi pangkal tolak yang kuat untuk memperkuat partisipasi demokratis dan membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

Pentingnya etika politik dalam pembangunan bangsa tak terbantahkan. Etika politik tidak hanya menciptakan kerangka kerja moral untuk perilaku politik yang baik, tetapi juga

mempromosikan integritas, akuntabilitas, keadilan, dan kerjasama yang konstruktif. Dengan memperkuat nilai-nilai etika politik, sebuah negara dapat menghadapi tantangan kompleks zaman modern dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan adil. Oleh karena itu, upaya untuk membangun budaya politik yang didasarkan pada etika politik harus terus didorong dan diprioritaskan oleh semua pemangku kepentingan.

Etika politik, sebagai bagian integral dari praktik politik, memainkan peran penting dalam membentuk perilaku dan keputusan politik yang bertanggung jawab. Hal ini melibatkan aspek-aspek moral dan nilai-nilai yang memandu tindakan para pemimpin politik dan aktor politik lainnya. Dalam konteks pembangunan bangsa, pentingnya etika politik sangatlah relevan, mengingat keputusan politik yang diambil memiliki dampak yang signifikan terhadap nasib dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, etika politik juga membentuk landasan bagi tata kelola politik yang baik, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang aktif. Dalam sebuah sistem politik yang diatur oleh prinsip-prinsip etika, kepentingan masyarakat umum ditempatkan di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini membantu memastikan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan benar-benar melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya segelintir elite politik atau kepentingan bisnis tertentu.

Selain itu, etika politik juga berperan dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi politik. Ketika masyarakat melihat adanya integritas, kejujuran, dan moralitas dalam tindakan para pemimpin politik, hal ini dapat meningkatkan legitimasi sistem politik secara keseluruhan. Sebaliknya, jika terjadi pelanggaran etika politik seperti korupsi, nepotisme, atau penyalahgunaan kekuasaan, hal tersebut dapat merusak kepercayaan publik dan memicu ketidakstabilan politik serta sosial.

Dalam konteks global, etika politik juga mencakup tanggung jawab terhadap isu-isu global seperti perubahan iklim, ketimpangan ekonomi antar-negara, dan konflik berskala internasional. Negara-negara dan pemimpin dunia memiliki tanggung jawab moral untuk bekerja sama dalam menangani tantangan-tantangan ini secara adil dan berkeadilan, serta memastikan bahwa keputusan politik yang diambil memperhatikan kepentingan bersama manusia dan planet ini.

Selain itu, dalam lingkup politik internasional, etika politik juga mencakup prinsip-prinsip diplomasi yang beradab dan penghargaan terhadap kedaulatan serta integritas negara lain. Konflik-konflik antarnegara dapat dihindari atau diselesaikan dengan cara-cara damai dan beradab, yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika politik yang mendorong dialog, kerja sama, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa etika politik memainkan peran yang krusial dalam membentuk tatanan politik yang adil, stabil, dan berkeadilan. Etika politik membimbing para pemimpin politik dan aktor politik lainnya dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab dan memperhatikan kepentingan bersama masyarakat. Selain itu, etika politik juga memberikan dasar moral bagi tata kelola politik yang baik dan membangun kepercayaan publik terhadap institusi politik. Dengan mematuhi prinsip-

prinsip etika politik, diharapkan bahwa pembangunan bangsa dan hubungan antarbangsa dapat berjalan dalam arah yang positif dan berkelanjutan.

Selain itu, pentingnya etika politik juga termanifestasi dalam pembangunan kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Kebijakan yang dirancang dengan memperhatikan nilai-nilai etika politik cenderung lebih adil dan merata dalam distribusi manfaat dan beban di antara berbagai segmen masyarakat. Hal ini memastikan bahwa tidak ada kelompok yang terpinggirkan atau dirugikan secara tidak adil dalam proses pembangunan dan pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya, dalam konteks pembangunan bangsa, etika politik juga mendorong terciptanya lingkungan politik yang inklusif dan demokratis. Ketika para pemimpin politik dan pembuat kebijakan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip etika politik, mereka cenderung lebih terbuka terhadap partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Ini berarti bahwa suara dan aspirasi warga negara memiliki peluang lebih besar untuk didengar dan diperhitungkan dalam penyusunan kebijakan publik.

Tidak hanya itu, dalam konteks globalisasi, etika politik juga menuntut adanya keterlibatan yang bertanggung jawab dan berkesinambungan dalam isu-isu global. Negara-negara dan pemimpin dunia diharapkan untuk mengutamakan kepentingan bersama manusia dan planet ini di atas kepentingan nasional atau korporat. Ini mencakup komitmen untuk mengatasi masalah-masalah global seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, dan konflik bersenjata dengan cara-cara yang adil dan berkelanjutan.

Selain itu, pentingnya etika politik juga tercermin dalam hubungan antarbangsa yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip kerja sama, saling menghormati, dan saling menguntungkan. Negara-negara diharapkan untuk menjalin hubungan yang bersahabat dan saling mendukung, tanpa adanya hegemoni atau intimidasi dari satu pihak terhadap yang lainnya. Dengan mengutamakan etika politik dalam hubungan internasional, diharapkan dapat tercipta lingkungan global yang damai, stabil, dan berkeadilan bagi semua negara dan masyarakat dunia.

Terakhir, etika politik juga membantu membangun budaya politik yang bersih dan berintegritas di semua tingkatan pemerintahan. Ketika para pemimpin politik dan birokrat mematuhi prinsip-prinsip etika politik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, hal ini menciptakan lingkungan kerja yang profesional, transparan, dan bebas dari korupsi. Dengan demikian, dapat dihindari adanya penyalahgunaan kekuasaan, penyelewengan dana publik, atau praktek-praktek lain yang merugikan masyarakat dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi politik.

Dengan demikian, kesadaran akan pentingnya etika politik menjadi krusial dalam memastikan bahwa pembangunan bangsa dan hubungan antarbangsa dapat berlangsung dalam kerangka yang adil, berkelanjutan, dan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Etika politik memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan bersama masyarakat, menciptakan lingkungan politik yang inklusif dan demokratis, dan memastikan keterlibatan yang bertanggung jawab dalam isu-isu global. Dengan mematuhi prinsip-prinsip etika politik, diharapkan bahwa pembangunan bangsa dan hubungan antarbangsa dapat berjalan dalam arah yang positif dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Dalam kesimpulan, pentingnya etika politik dalam pembangunan bangsa tidak bisa diragukan lagi. Etika politik membentuk dasar moral dan prinsip-prinsip yang memandu perilaku para pemimpin politik, pembuat kebijakan, dan masyarakat dalam menjalankan fungsi politik mereka. Dengan mematuhi prinsip-prinsip etika politik, pembangunan bangsa dapat dilakukan dengan cara yang adil, berkelanjutan, dan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti keadilan sosial, demokrasi, partisipasi masyarakat, hubungan internasional yang harmonis, serta integritas dan transparansi dalam pemerintahan. Dengan demikian, menjunjung tinggi etika politik bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga merupakan fondasi yang kokoh dalam membangun bangsa yang kuat, damai, dan sejahtera bagi semua warganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ramadhani, M. R., & Syarif, Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN SALURAN PENGHUBUNG PADA BENDUNG DI SERDANG*. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).
- Tarigan, U., & Hasibuan, M. A. (2013). *Pengaruh Kepemimpinan Dalam Peningkatan Koordinasi Kerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Kurniawan, M. Y. (2022). *Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Data, P., Tarigan, R. S., Wibowo, H. T., Azhar, S., & Wasmawi, I. (2016). *Manual Procedure Petunjuk dan Mekanisme Pengoperasian Pendaftaran Ulang Online Mahasiswa Lama*.
- Tarigan, R. S., Wasmawi, I., & Wibowo, H. T. (2020). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Tanda Tangan Gaji Online (SITAGO)*.
- TARIGAN, R. G., & Harahap, G. Y. (2022). *LAPORAN KERJA PRAKTEK PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG MENARA BRI JL. PUTRI HIJAU NO. 2-KOTA MEDAN*. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).
- Tarigan, U., & Lubis, A. A. (2014). *Tingkat Pendapatan dan Proses Pemungutan Retribusi Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai*.
- Siregar, N. S. S. (2017). *Modul Praktikum Publik Speaking*.
- Barus, R. K. I., & Dwiana, R. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Thamrin, M. H., & Batubara, B. M. (2014). *Pengaruh Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat di Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang*.
- Harahap, G. Y. (2001). *Taman Bermain Anak-Anak di Medan Tema Arsitektur Perilaku* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Rangkuti, A. H., Siregar, T., & Munawir, Z. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*.
- Tarigan, R. S., Azhar, S., & Wibowo, H. T. (2021). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Aplikasi Registrasi Asrama Kampus*.
- Tarigan, U. (2013). *Politik Pembangunan Partai Politik Islam: Studi Pemikiran Politik Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*.
- Ritonga, S., & Batubara, B. M. (2020). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Tarigan, R. S. (2016). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Elearning*. uma. ac. id.
- Siregar, N. S. S. (2019). *Analisis Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Timur* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Deliana, M. (2013). *Pengaruh Budaya Perusahaan (Corporate Culture) terhadap Kinerja Karyawan* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Muda, I., & Mustofa, W. (2023). *Implementasi Prinsip Good Governance Responsitas Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Kantor Kantor Camat Lingga Bayu Kabupaten Madina* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Kadir, A., & Siregar, N. S. S. (2019). *Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam Tahun 2018*.
- Kadir, A., & Nasution, I. (2014). *Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai Periode 2009-2014*.
- Tarigan, U., & Fahmi, I. (2014). *Standar Pelayanan dalam Pengurusan Surat-Surat Kependudukan di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang*.
- Tarigan, R. S., & Dwiatma, G. *ANALISA STEGANOGRAFI DENGAN METODE BPCS (Bit-Plane Complexity Segmentation) DAN LSB (Least Significant Bit) PADA PENGOLAHAN CITRA*.
- Sianipar, G. (2019). *Respon pertumbuhan dan produksi tanaman kacang tanah (arachis hypogaea l.) Terhadap pemberian kompos batang jagung dan pupuk organik cair limbah ampas tebu* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Siregar, S. A. (2018). *implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Gelandangan dan Pengemisan serta Praktek Tuna Susila di Kota Medan*.
- Lubis, M. M., & Siregar, N. S. S. (2013). *Analisis Implementasi Harga Pembelian Pemerintahan (HPP) Beras Terhadap Pendapatan Petani dan Pencapaian Swasembada Beras di Sumatera Utara*.

- Tarigan, R. S. (2017). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Academic Online Campus (AOC)*.
- Kadir, A., & Tarigan, U. (2018). *Peranan Dinas Tata Kota dan Pertamanan dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Tanjungbalai*.
- Angelia, A. (2022). *Analisis Implementasi Sistem Kinerja Anggaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara*.
- Tarigan, U. (2004). *Implementasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur*.
- Batubara, B. M., Humaizi, H., Kusmanto, H., & Ginting, B. (2022, November). *Poverty reduction program in Medan city: Public policy perspective*. In *AIP Conference Proceedings (Vol. 2659, No. 1)*. AIP Publishing.
- Muda, I., & Batubara, B. M. (2018). *Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kota Medan*.
- Siregar, N. S. S., & Yolanda, A. (2022). *Gangguan Komunikasi Self-Harm Remaja Di Masa Covid-19 Pada Desa Sei Rotan Kabupaten Deli Serdang*.
- Rahmawani, R. (2021). *Pengaruh Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kerja Karyawan PT. Sinarmas Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Lubis, Y. A., & Batubara, B. M. (2020). *Implementasi Musyawarah Rencana Pembangunan (Studi Musrenbang di Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Dewi, R., & Muda, I. (2013). *Fungsi Kedudukan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pelaksanaan Tertib Pertanahan di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang*.
- TELAUMBANUA, F., & Syarif, Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG MENARA BANK BRI MEDAN. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.
- Siregar, N. S. S. (2002). *Perkembangan Filsafat Komunikasi di Indonesia*.
- Simarmata, O. H. (2020). *Pengaruh Kinerja Keuangan (Roa) Dan Ukuran Perusahaan (Size) Terhadap Nilai Perusahaan (Per) Pt. Indofood Sukses Makmur Tbk Periode 2010-2018 (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- OKTAVIANI, R., & Syarif, Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN MERCU PADA BENDUNGAN LAU SIMEME SIBIRU-BIRU-DELISERDANG SUMATERA UTARA. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.
- Tarigan, U., & Dewi, R. (2004). *Fungsi Penataan Kearsipan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Pada Bagian Kepegawaian Kantor Pemerintah Kota Tebing Tinggi (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- PRATAMA, R., & Harahap, G. Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN LIVING PLAZA MEDAN. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.
- Adil, A., Liana, Y., Mayasari, R., Lamonge, A. S., Ristiyana, R., Saputri, F. R., ... & Wijoyo, E. B. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Get Press indonesia.
- Wahyudi, A., & Tarigan, R. S. (2022). *SISTEM INFORMASI SEKOLAH BERBASIS WEB PADA SMP NUSA PENIDA. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.
- Gunawan, I., Matondang, A., & Sembiring, M. (2020, February). *Lean Technology Implementation For Reducing The Dwelling Time Level*. In *Proceedings of the 1st International Conference of Global Education and Society Science, ICOGESS 2019, 14 March, Medan, North Sumatera, Indonesia*.
- Hartono, B. *HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT: A STUDY OF THE POLICY IMPLEMENTATION OF THE TRAINING POLICY TOWARD CAREER OF GOVERNMENT'S SERVANTS IN SLEMAN REGION*.
- Harahap, G. Y. (2020). *Instilling Participatory Planning in Disaster Resilience Measures: Recovery of Tsunami-affected Communities in Banda Aceh, Indonesia*. *Budapest International Research in Exact Sciences (BirEx) Journal, 2(3), 394-404*.
- Tarigan, U., & Suriadi, A. (2007). *Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Aceh Timur*.
- Tarigan, U., & Harahap, B. (2006). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang surat Izin Tempat Usaha (SITU) di Kabupaten Gayo Lues*.
- Nasution, I., & Tarigan, U. (2017). *Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Local di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang)*.
- Dewi, W. C. (2020). *Pengaruh Likuiditas Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018 (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Sembiring, W. M. (2023). *Peranan Babinsa (Bintara Pembina Desa) Koramil 0201/Medan Komando Rayon Militer 11/Md dalam Pembinaan Kenakalan Remaja di Kecamatan Medan Deli*.
- Tarigan, U. (2004). *Peranan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Administrasi Pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.

- Wibowo, H. T., Tarigan, R. S., & Mukmin, A. A. (2022). *APLIKASI MARKETPLACE PENDAMPING WISATA DENGAN API MAPS BERBASIS MOBILE DAN WEB*. Retrieved from osf.io/3jpd/.
- Tarigan, U. (2012). *Evaluasi Dampak Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh)*.
- Wuri Andary, R. (2015). *Komunikasi Bermedia dan Perilaku Pelajar (Studi Korelasional tentang Penggunaan Smartphone terhadap Perilaku Pelajar SMA Negeri I Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara)*.
- Tarigan, U. (2016). *Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan Tahun 2015 di Kecamatan Torgamba (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Berutu, B. R. (2019). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat*.
- Rejeki, R. (2019). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Santoso, M. H. (2021). *Laporan Kerja Praktek Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru Berbasis Web pada SMA Swasta Persatuan Amal Bakti (PAB) 8 Saentis*.
- Muda, I., & Lubis, Y. A. (2023). *Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Smart City (Studi Kasus di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan)*.
- Muda, I., & Dewi, R. (2013). *Model Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama di Kecamatan Sipirok Tapanuli Selatan*.
- Muda, I., Harahap, R. H., Amin, M., & Kusmanto, H. (2022, November). *Problems of the exploitation policy of children of street beggars in Medan city*. In *AIP Conference Proceedings (Vol. 2659, No. 1)*. AIP Publishing.
- Tarigan, U. (2004). *Hubungan Kemampuan Manajemen Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana dan Efektivitas Pencapaian Program Keluarga Berencana di Kabupaten Aceh Tenggara*.
- Tarigan, U., & Dewi, R. (2018). *Evaluasi Prosedur Pelayanan KTP Elektronik di Kantor Camat Kecamatan Medan Belawan Kota Medan*.